

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SANITASI LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT (SLBM)
DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(Studi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung)**

Rizki Rachmaddianto, Imam Hanafi, Heru Ribawanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail : rizki.fia@gmail.com

Abstract: *The Implementation of Policy on Community-Based Environmental Sanitation Program (SLBM) in Sustainable Development (Studies in the Department of Public Works Bina Marga and Cipta Karya Tulungagung Regency). The development of growth in urban areas or district that was so advanced make the emergence of an assortment of the problems that very complex, one of the problems has not been this point is of sanitation problems. Sanitation is an effort to create a program to prevent the emergence of all kinds of disease. Sanitation is one way to clean from all elements that would enable the disorder disease. The SLBM in Tulungagung enough executed properly, with some strategy, of the success of sanitation development there are indications that affects the success of which are in the selection of location, already the community participation of operational and maintenance at some of the location of targets. But of the overall implementation of the program ineffective SLBM activities is the hometown selection. Because of the limited fasilitator empowerment new who is known by the managers. That the Policy Impact Community-Based Environmental Sanitation Program (SLBM) in Tulungagung Regency where research conducted in the Department PUBMCK Tulungagung Regency has should be enough to show positive results against sustainable development.*

Keywords: *sanitation, policy, sustainable development*

Abstrak: **Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung).** Perkembangan pertumbuhan di wilayah perkotaan maupun kabupaten yang begitu pesat menjadikan munculnya bermacam-macam permasalahan yang sangat kompleks, Salah satu permasalahan yang belum tuntas saat ini adalah masalah sanitasi. Sanitasi adalah suatu usaha kegiatan yang untuk menciptakan keadaan dengan menghindarkan timbulnya gangguan bermacam-macam penyakit. Salah satu cara sanitasi adalah dengan mengusahakan kebersihan dari segala unsur yang dapat memungkinkan timbulnya gangguan penyakit. Program SLBM di Tulungagung sudah cukup dijalankan secara baik, dengan adanya beberapa strategi, dari keberhasilan pembangunan sanitasi terdapat indikasi yang mempengaruhi keberhasilan yaitu dalam seleksi lokasi, sudah adanya partisipasi masyarakat tentang operasional dan pemeliharaan pada beberapa lokasi sasaran. Tetapi dari keseluruhan pelaksanaan program SLBM belum optimalnya kegiatan ialah seleksi kampung. Karena terbatasnya fasilitator pemberdayaan yang memang baru dikenal oleh pelaksana. Dampak dari kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Tulungagung dimana penelitian yang dilakukan pada Dinas PUBMCK Kabupaten Tulungagung sudah cukup menunjukkan hasil yang positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: sanitasi, kebijakan, pembangunan berkelanjutan

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat terutama di wilayah maupun daerah tertentu memberikan bermacam-macam dampak dari pertumbuhan penduduk, misalnya semakin banyak pemukiman padat penduduk akan menambah keseriusan lingkungan, terbatasnya lahan terbuka hijau dan yang sangat serius adalah

terhadap penurunan daya dukung lingkungan yang disebabkan perilaku manusia itu sendiri. Maka dari itu dampak yang ditimbulkan harus disikapi dan diamati dengan tepat, karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan dan menimbulkan perilaku yang negatif.

Perkembangan pembangunan wilayah maupun daerah yang begitu cepat akan

mengakibatkan munculnya beberapa macam permasalahan yang ada, yakni masalah sanitasi lingkungan dimana. Masalah sanitasi, sangat bisa menimbulkan kerusakan pada fisik lingkungan serta mental sosial masyarakat oleh sebab itu kegiatan bersanitasi suatu usaha yang wajib dilakukan untuk menciptakan kesadaran keadaan yang dapat menghindarkan timbulnya gangguan dan penyakit. Salah satu cara sanitasi yakni dengan menjaga kebersihan dari segala unsur yang mempengaruhi kelestarian lingkungan dan yang paling tepat memungkinkan menghindarkan timbulnya gangguan dan penyakit.

Masalah sanitasi merupakan fenomena yang bisa dikatakan krusial dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai banyak pihak, bukan hanya pihak yang terkait tetapi semua elemen yang berpengaruh dalam peningkatan akses sanitasi yang layak. Hal ini menjadi salah satu agenda khusus dalam memenuhi tujuan utama *Millenium Development Goals* (MDG's). Berdasarkan Laporan Pencapaian di Indonesia pada tahun 2010 akses sanitasi di wilayah perkotaan masih di angka 69,51% dari target yang akan dicapai pada tahun 2015.

Bergulirnya otonomi daerah sekaligus berlakunya Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pembangunan sanitasi tidak hanya dilakukan pada Pemerintah Pusat saja, namun melainkan juga menjadi wewenang Pemerintah Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah sangat memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akses sanitasi yang layak di masyarakat termasuk masyarakat di daerah wilayah perkotaan, salah satunya seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan kebijakan program SLBM.

Kabupaten Tulungagung merupakan kota kecil di tepian laut selatan, yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung adalah kota yang penghasil batuan marmer ataupun batuan-batuan pualam terbesar di Indonesia. Wilayah Tulungagung terletak di sebelah barat daya atau kurang lebih berjarak sekitar 154 Km dari ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya.

Tulungagung buruknya sanitasi, sering kali menyebabkan masalah ditingkat kesehatan, terutama munculnya berbagai masalah penyakit seperti muntaber, diare dan penyakit kulit lainnya seperti alergi dan gatal-gatal dimana kasus ini diderita pada anak usia dini atau balita. Tercatat penyakit diare di tahun 2009 sebanyak 6.689 kasus kejadian dan ditahun 2010 meningkat pesat tercatat 11.981 dengan 8.135 kasus penyakit. Jelasnya selamanya bisa meningkat secara

signifikan apabila pembangunan sanitasi tidak dijalankan dengan baik dan terpantau.

Kebijakan sanitasi telah di implementasikan di Kabupaten Tulungagung, salah satu kebijakan tersebut adalah program pembangunan sarana sanitasi yang menunjang kesejahteraan masyarakat, sarana sanitasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya pada tahun 2007 yang mana program pembangunan sanitasi disebut (STBM) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat terus berkembang sampai di tahun 2011 Kabupaten Tulungagung memulai kebijakan program sanitasi yang disebut SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat). Pendekatan pada program ini melibatkan secara penuh masyarakat dalam perencanaan, pembangunan maupun pengawasan sarana sanitasi, baik dalam bentuk MCK++ (Mandi, Cuci, Kakus) maupun IPAL Komunal (Instalasi Pengelolaan Air Limbah).

Tinjauan Pustaka

1) Kebijakan Publik

Terdapat beberapa definisi mengenai kebijakan publik, dimana masing-masing definisi memberikan penekanan serta pengertian dan pemahaman yang berbeda. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Dye dalam Subarsono (2005, h.2) Kebijakan publik adalah tindakan, pilihan pemangku kepentingan untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sedangkan menurut Anderson dalam Bherta (2009, h.11) mengemukakan kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan organisasi pemerintah. Jadi kebijakan publik disini hanya dibuat oleh Pemerintah dan bukan swasta.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan maka kebijakan publik dapat dikatakan ataupun disimpulkan dimana kebijakan publik merupakan: (1) keputusan bersama yang dibuat oleh pemilik pemerintah, (2) berorientasi didasari pada kepentingan publik dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan, (3) untuk sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang dilakukan.

2. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan yang berkembang saat ini sebagai respon berbagai masalah adalah Pembangunan Berkelanjutan. Brundtland dalam Budiharjo (2009, h.17) pengertian lain tentang pembangunan berkelanjutan menyatakan

pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa baik sosial, ekonomi, serta lingkungan tanpa melupakan generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Pengertian mendasar dari *sustainable development* adalah bahwa dalam keberhasilan pembangunan ekonomi maupun sosial setidaknya bisa memperbaiki keadaan yang sebenarnya, bukan merusak kondisi lingkungan yang ada. Namun pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada di lingkungan saja. Tetapi mencakup tiga ruang lingkup kebijakan antara lain yakni: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan. Ketiga dimensi tersebut saling terkait yang mana merupakan pilar pendorong bagi suatu pembangunan berkelanjutan. Keseimbangan dari ketiga dimensi itu sangat diperlukan untuk mengukur keberhasilan fenomena permasalahan sanitasi. Standar pembangunan dan pelaksanaan program SLBM akan sangat tergantung dari hasil partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan.

3. Sanitasi

Sanitasi merupakan usaha menciptakan suatu keadaan atau perilaku hidup sehat dengan mengutamakan kebersihan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan aktivitas maupun perilaku yang mana untuk menghindari gangguan penyakit seperti diare. Sanitasi lingkungan merupakan status kesehatan lingkungan yang mencakup beberapa aspek antara lain pembuangan kotoran, perumahan, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). Lingkungan sosial serta kelangsungan kehidupan manusia akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan kehidupan sosial lainnya. Oleh sebab itu sangat perlu adanya kebijakan tentang sanitasi dimana sangat mempengaruhi seluruh elemen kehidupan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus Penelitian : Program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung dan Dampak dari kebijakan program SLBM. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Tulungagung. Situs penelitian ini adalah Program SLBM yang berada di Kabupaten Tulungagung. Sumber data Primer: staf pegawai kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung, Sekunder: Arsip-arsip maupun data-data yang berhubungan dengan Implementasi kebijakan SLBM di Kabupaten

Tulungagung. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi.

Pembahasan

1. Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Tulungagung

Pendekatan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) sebagai bentuk kebijakan pemerintah terkait perbaikan sanitasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat kumuh miskin perkotaan. Diperlukan pendekatan-pendekatan maupun strategi yang inovatif, karena dengan adanya masyarakat sebagai pengguna utama dan pembangunan lingkungan sebagai prinsip pokok dari kelestarian alam. Paradigma baru yang diterapkan untuk masing-masing sektor sanitasi yaitu :

- Sektor Air Limbah
- Sektor Persampahan
- Sektor Drainase

Dalam pelaksanaannya kegiatan SLBM harus mengacu pada dokumen petunjuk umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis SLBM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) dengan memasukkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

SLBM juga menggunakan prinsip seleksi-sendiri (*self selection*), opsi teknologi sanitasi, partisipatif dan pemberdayaan. Pola penyelenggaraan SLBM dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan difasilitasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang memiliki kemampuan teknis dan social kemasyarakatan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

a) Kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)

Kebijakan sanitasi telah digulirkan pemerintah melalui kebijakan makro, meso atau menengah, maupun mikro. Kebijakan sanitasi di tingkat Pusat tergambar dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah diterbitkan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air, maupun PP No. 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, di samping itu untuk penetapan tingkat pencemaran Pemerintah telah menetapkan dasar

baku mutu antara lain Baku Mutu untuk air limbah domestik sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 112 Tahun 2003, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu air limbah di kawasan industri.

b) Aktor Terkait Pelaksanaan Kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Berkelanjutan

Pelaksanaan program SLBM aktor ataupun pihak-pihak yang terkait atas pembangunan sanitasi di Tulungagung yakni: 1) Bidang perencanaan di pegang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2) Bidang pendanaan dipegang oleh badan atau dirjen penganggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan dan aset, 3) Bidang Teknis, PU BM CK, 4) Bidang penyehatan komunikasi dan pemberdayaan, Dinas Kesehatan, 5) Bidang monitoring dan evaluasi, Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil semua aktor yang melakukan tugas serta fungsinya tetap didasari dengan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara pihak-pihak maupun aktor-aktor pembangunan sanitasi karena bukan hanya semata-mata untuk mewujudkan keberhasilan suatu program saja tetapi mengukur keberhasilan melalui evaluasi, menganalisis melalui AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan dimulai supaya tercapainya keberlanjutan program SLBM dan terwujudnya kesadaran masyarakat.

c) Pelaksanaan Kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)

Sebuah program akan efektif bila para pelaksana program memahami tujuan SLBM. Program ini dikerjakan tentu karena melihat sebuah tujuan yang ingin dicapai, itulah visi dan misi program, demi kepentingan publik dan kepentingan bersama. Dari hasil penyajian data maka dalam Pedoman pelaksanaan melalui Petunjuk Teknis DAK Sanitasi Kabupaten Tulungagung dimana di tingkat kabupaten tahapan implementasi/pelaksanaan program dimulai dengan seleksi lokasi, sosialisasi, seleksi kampung, pembentukan KSM, Penyusunan RKM, Pelatihan, Kampanye Kesehatan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasional dan Pemeliharaan, Monitoring/pengawasan.

2. Dampak Dari Kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Dampak program SLBM di Kabupaten Tulungagung ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan program sanitasi yang dijalankan merupakan kebijakan pembangunan perkotaan yang dimana dampak yang ditimbulkan secara

langsung memang ditunjukan terhadap pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung terhadap lingkungan, sosial serta ekonomi. Dampak yang ditimbulkan bisa saja berupa dampak yang baik atau positif serta da juga dampak yang buruk dan atau terhambatnya proses pembangunan sanitasi yakni dampak negatif.

Dampak program sanitasi yang ditimbulkan secara langsung memang ditunjukan terhadap pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung terhadap lingkungan, sosial serta ekonomi. Seperti halnya yang disebutkan oleh Salim (2009, h.15) hubungan keseimbangan antar tiga sektor dalam pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi.

a. Lingkungan

Dalam sektor lingkungan sangat mempengaruhi pada hasil di lapangan karena kegiatan bersanitasi di Kabupaten Tulungagung sangat memprioritaskan kelestarian lingkungan melalui sanitasi yang menjadikan masyarakat hidup bersih dan layak dalam melakukan kegiatan bersanitasi. Adapun kurangnya lahan dalam tujuan membangun sanitasi layak yang masyarakat bersedia menghibahkan tanahnya untuk pembangunan sarana prasarana sanitasi,hal ini bisa berdampak buruk untuk kelangsungan dalam pembangunan kegiatan sanitasi di wilayah-wilayah maupun daerah target pelaksanaan program sanitasi lingkungan yang berlangsung.

b. Sosial

Aspek sosial sangat berpengaruh dengan adanya program dan kebijakan SLBM menjadi sadar perilaku hidup bersih dari adanya pembuatan program berupa fasilitas-fasilitas sanitasi yang bisa dimanfaatkan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tetapi keseluruhan masih belum terwujudnya dengan baik karena kendala yang terjadi adanya kurang pemerataan dalam meningkatkan kehidupan dan kesadaran sosial masyarakat.

c. Ekonomi

Sektor ekonomi dengan hasil yang ada meningkatkan segi ekonomi belum terwujud dan belum terlihat secara maksimal tetapi untuk pembangunan program yang dicari padat kumuh miskin dari melihat pendapatan dan tatanan ekonomi rumah tangga masyarakat sudah cukup terlihat, tetapi untuk kesehatan menjadi aspek yang mampu menunjang martabat masyarakat karena dengan hidup bersih biaya pengeluaran untuk berobat semakin kecil. Maka dari itu dari sisi ekonomi dapat meningkatkan keberlanjutan suatu program untuk meningkatkan gaya hidup

bersih dengan baik hanya memberikan sosialisasi, arahan serta pengertian-pengertian tentang sanitasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang dilaksanakan pemerintahan daerah Tulungagung dalam pembangunan berkelanjutan SLBM sudah cukup baik dilaksanakan karena masyarakat sudah cukup mengerti dan sadar

manfaat dari pelaksanaan sanitasi, implementasi yang dijalankan oleh Pemerintah Tulungagung sudah diterapkan secara baik dan tinggal merubah pola pikir masyarakat, adapun partisipasi masyarakat yang membantu pembangunan sarana maupun fasilitas layak sanitasi akan tetapi masih ada sebagian yang harus ditingkatkan dalam pengembangan dan pembangunan sanitasi seperti kerjasama semua pihak antara pemerintah dengan tim Pokja sanitasi, masyarakat dan pihak swasta untuk mewujudkan keberhasilan suatu pembangunan.

Daftar Pustaka

- Bherta, Wiguna Sinya. (2009) **Collaborative Empaworment in Interregional Infrastructure Development**. Magister.thesis, Institut Teknologi Bandung.
- Budihardjo, (2009) **Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan**. Bandung, Alumni.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (1997a) **Prinsip-prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2003b) **Prinsip-prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Subarsono, AG. (2005) **Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air**. Jakarta, Departemen Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah di Kawasan Industri**. Jakarta, Kementrian Lingkungan Hidup.